

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEPADA KELUARGA MISKIN**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang
Tahun 2025/2026)**

SKRIPSI



OLEH:

EKA NUR ANING AISYAH

NPM 22201091047

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**



**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEPADA KELUARGA MISKIN**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang
Tahun 2025/2026)**

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

**EKA NUR ANINGAISYAH
NPM 22201091047**

Pembimbing Utama

Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si

Pembimbing Pendamping

Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS
ISLAM MALANG
MALANG
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, “Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada keluarga Miskin (Studi Kasus di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026)” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 27 Juni 2026
Yang membuat pernyataan




Eka Nur Aning Aisyah
22201091047

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KEPADA KELUARGA MISKIN
(Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang
Tahun 2025/2026)**

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 28 Juni 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping



(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004



(Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si)
NPP. 1940200017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP)

NPP. 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KEPADA KELUARGA MISKIN
(Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang
Tahun 2025/2026)**

Oleh:

Eka Nur Aning Aisyah

22201091047

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 8 Juli 2026

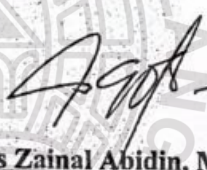
Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1



Dr. Alifuddin, S.Ag., M.Si
NPP. 21515061976321004



Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si
NPP. 1940200017

Anggota Penguji 2



Taufiq Rahman Ilvas, S.AP., M.AP
NPP. 192511199032116

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik



Dr. Alifuddin, S.Ag., M.Si
NPP. 21515061976321004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang paling berarti dalam hidup saya. Kepada Ayah Sutezi dan Ibu Nur Laili Hidayati, Terima kasih telah menjadi rumah, tempat pulang, dan alasan penulis untuk terus melangkah. Gelar ini saya persembahkan untuk kalian. Untuk Almarhum Ayah Madlihan, Terima kasih telah menjadi bagian dari alasan saya untuk terus berjuang. Terima kasih telah menjadi cinta pertama dan alasan penulis untuk tidak pernah berhenti berusaha.



MOTTO

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang...” (Q.S. Al-Isra; 24)

“Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.” (HR. Tirmidzi)

“Mereka tidak pernah menuntut balas, hanya berharap anaknya tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik dari segala pengorbanannya.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul "Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin (Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026)" dengan baik. Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat kepada:

1. Kepada Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. Afifuddin, S.Ag.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang tahun 2026.
3. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. Selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang 2026.
4. Dr. Afifuddin.,S.Ag.,M.Si Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dalam proses pengerjaan skripsi ini dengan ketulusannya, kesabarannya serta kewibawaannya sebagai ilmuwan, penulis sampaikan

banyak terimakasih, semoga allah senantiasa memberi balasan yang terbaik untuk beliau.

5. Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, penulis sampaikan banyak terima kasih atas keikhlasannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk bimbingan serta arahan yang diberikan. semoga allah senantiasa memberi balasan yang terbaik untuk beliau.
6. Seluruh Dosen Fakultas serta staff ilmu Administrasi terutama pada Dosen Program studi Administrasi Publik telah memberikan pembekalan Ilmu yang barokah selama perkuliahan berlangsung.
7. Paling utama, terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.
8. Dengan penuh rasa hormat dan kerinduan yang tidak pernah selesai, skripsi ini saya persembahkan kepada almarhum ayah tercinta. Walaupun beliau telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT, kehadirannya tetap menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah padam dalam setiap langkah hidup saya. Mungkin tidak lagi hadir secara fisik untuk menyaksikan proses ini sampai selesai, namun saya percaya doa beliau tetap menyertai dari tempat terbaik di sisi-Nya.

9. Terimakasih Kepada Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.
10. Terimakasih kepada teman perjalanan dalam menempun gelar ini Tita, Aldi, Lujeng, Aidah, Citra, Michelle, Mayang, Ike, Rico, Bitu, Icha, Afi, Ella, Nihda yang telah banyak membantu Penulis. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, penasehat, support, pendengar yang baik. Terimakasih tak terhingga atas kesetiaan kalian mendampingi dalam suka maupun duka. Dukungan moral, semangat, dan motivasi yang kalian berikan selalu menjadi penguat untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan bagi penulis khususnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis sangat berharap kepada semua pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di penelitian berikutnya.

Malang, 28 Juni 2026

Penyusun

Eka Nur Aning Aisyah
(22201091047)

RINGKASAN

Eka Nur Aning Aisyah, 2026. 22201091047, **Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin (Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026)**, Dr. Afifuddin, S.Ag.,M.Si , Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si, 25830 kata , 135 halaman, xvi halaman romawi.

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terhadap keluarga miskin di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya permasalahan kemiskinan, khususnya keterbatasan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan meskipun berbagai program bantuan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bantuan pangan berdasarkan teori Richard M. Steers meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Secara umum, kebijakan bantuan pangan telah memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan serta mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta belum maksimalnya proses pembaruan dan verifikasi data penerima. Pada aspek integrasi, pelaksanaan kebijakan melibatkan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta RT/RW dalam proses pendataan, verifikasi, distribusi, dan pengawasan bantuan. Namun, koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat melalui komunikasi dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Agar menjadi program yang lebih membangun, bantuan pangan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diintegrasikan dengan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan perangkat kelurahan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pembaruan data penerima, perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi agar kebijakan bantuan pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Bantuan Pangan, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Purwantoro.

SUMMARY

Eka Nur Aning Aisyah, 2026. 22201091047, *Effectiveness of the Food Assistance Policy by the Food Security and Agriculture Service for Poor Families (Case Study in Purwantoro Village, Blimbing District, Malang City, 2025/2026)*, supervised by Drs. Afifuddin, S.Ag., M.Si and Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si, 25830 Word approximately 135 pages, vi preliminary pages.

This study examines the effectiveness of the food assistance policy implemented by the Department of Food Security and Agriculture of Malang City for poor families in Purwantoro Subdistrict, Blimbing District. The background of this study is based on the ongoing issue of poverty, particularly the limited ability of poor communities to fulfill their basic food needs despite various assistance programs implemented by the government. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through source and technique triangulation. The results of the study indicate that the effectiveness of the food assistance policy based on Richard M. Steers' theory includes the indicators of goal achievement, integration, and adaptation. In general, the food assistance policy has provided benefits in supporting food fulfillment and reducing household expenditure burdens among poor families. However, the implementation of the program has not been fully optimal due to the occurrence of inaccurate targeting of assistance recipients, which is caused by changes in the socio-economic conditions of the community and the limited updating and verification process of recipient data. In terms of integration, the implementation of the policy involves coordination between the Department of Food Security and Agriculture, the Social Service Office, subdistrict government, and RT/RW representatives in the processes of data collection, verification, distribution, and monitoring of assistance. However, inter-agency coordination still needs to be strengthened through regular communication and evaluation to ensure that the program is more accurately targeted. To become a more constructive program, food assistance should not only function as consumptive support but also be integrated with empowerment programs to improve the economic independence of poor communities. Supporting factors in policy implementation include local government support, the involvement of subdistrict officials, and community participation. Meanwhile, inhibiting factors include limitations in updating recipient data, differences in community socio-economic conditions, and the lack of optimal coordination and program supervision. Therefore, strengthening inter-agency coordination is needed so that the food assistance policy can be implemented more effectively, accurately targeted, and sustainably.

Keywords: Policy Effectiveness, Food Assistance, Poverty, Community Welfare, Purwantoro Subdistrict.

BAB I

PENDAHULUAN

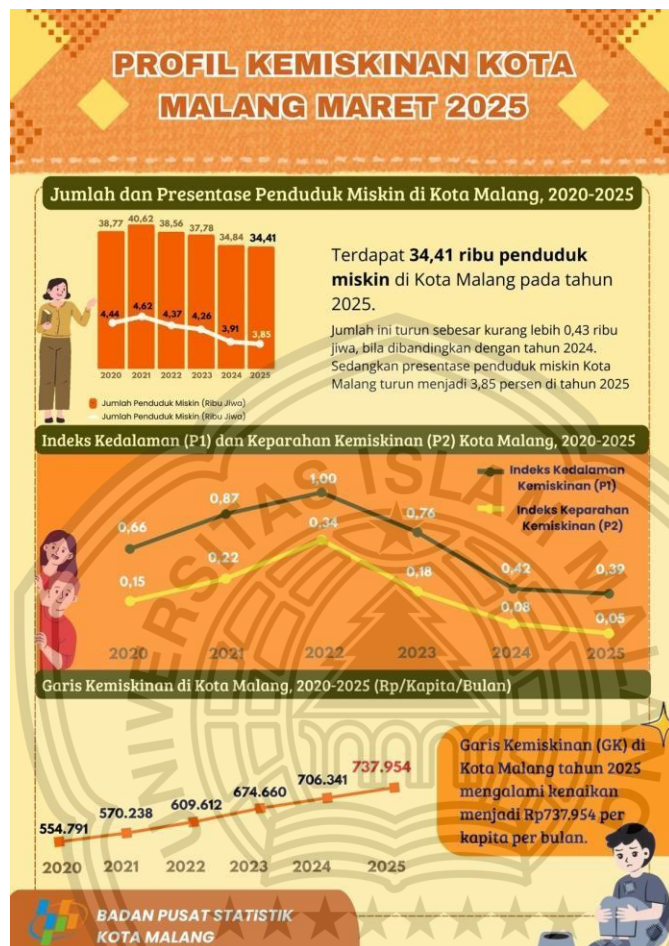
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki tingkatan berdasarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik membedakan penduduk miskin dan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan namun mudah jatuh miskin akibat guncangan ekonomi. Sementara itu, BKKBN mengklasifikasikan keluarga pra sejahtera sebagai keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Perbedaan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan setiap kelompok berbeda sehingga kebijakan bantuan pangan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing kelompok (BPS, 2023; BKKBN, 2019; Todaro & Smith, 2011).

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan sosial paling mendasar di Indonesia karena tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Fenomena kemiskinan kerap diperparah oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya dasar, terutama pangan, yang merupakan kebutuhan fundamental manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,85% atau sekitar 34.41 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Gambar 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Malang, 2020-2025



Sumber : BPS Kota Malang, 2025

Pada tingkat regional, Kota Malang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup signifikan. Kecamatan Blimbing memiliki tingkat kemiskinan sebesar 12% dan menempati peringkat kedua tertinggi di Kota Malang (Data BPS Kota Malang 2025). Garis kemiskinan di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 554.791 per kapita per bulan dan terus meningkat hingga mencapai Rp 737.954 per kapita per bulan

pada tahun 2025. Peningkatan garis kemiskinan ini menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan minimum masyarakat akibat perubahan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pangan dan non-pangan. Meskipun secara umum terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Malang, namun keberadaan kelompok masyarakat miskin masih menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kelompok tersebut masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan di Kota Malang tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan perlindungan sosial, salah satunya melalui kebijakan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah penelitian yaitu Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Sebagai respons atas meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat serta tekanan inflasi terhadap daya beli kelompok berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISPANGTAN) mengimplementasikan berbagai kebijakan bantuan pangan yang bertujuan menjaga stabilitas akses pangan keluarga miskin. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sejumlah program nasional dan daerah, antara lain Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta kebijakan

distribusi langsung bahan pangan pokok yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program-program ini secara normatif dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2023).

Salah satu bentuk kebijakan bantuan pangan daerah adalah penyaluran beras dan minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat. Para penerima ini datanya berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Malang, setiap keluarga penerima memperoleh bantuan pangan berupa total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan secara bertahap dalam dua tahap. Pada setiap tahap penyaluran, masyarakat menerima 10 kilogram beras dan liter minyak goreng merek Minyakita. Penyaluran bantuan ini mulai dilaksanakan sejak 30 Oktober 2023 dan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kota Malang, sebagaimana disampaikan oleh Kepala DISPANGTAN Kota Malang, Slamet Husnan, dalam rilis resmi pemerintah daerah. Skema distribusi bertahap tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus mengendalikan stabilitas distribusi logistik di tingkat lokal (Pemerintah Kota Malang, 2023).

Pada tahun 2025/2026, pelaksanaan kebijakan bantuan pangan di Kota Malang tetap dilanjutkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat miskin, seiring dengan kondisi kemiskinan Kota Malang yang pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,85 persen atau 34,41 ribu jiwa (BPS Kota Malang, 2025). Kebijakan ini difokuskan pada keluarga

miskin di berbagai wilayah, termasuk Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi cukup tinggi. Namun demikian, besarnya anggaran dan jumlah bantuan yang disalurkan belum secara otomatis menjamin efektivitas kebijakan bantuan pangan. Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas tidak hanya diukur dari aspek input dan output, seperti jumlah bantuan dan nilai anggaran, tetapi juga dari capaian outcome dan dampak kebijakan, antara lain ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu distribusi, kualitas bantuan, serta kemampuan bantuan tersebut dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga miskin. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bantuan pangan di Kota Malang, khususnya di Kecamatan Blimbing, perlu dikaji secara empiris untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implikasinya, apabila kebijakan bantuan pangan belum berjalan secara efektif, maka tujuan utama program dalam mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin berpotensi tidak tercapai secara optimal. Sebaliknya, apabila kebijakan dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas, maka bantuan pangan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengendalian inflasi daerah serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai efektivitas kebijakan bantuan pangan terhadap keluarga miskin di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tahun 2025/2026.

Gambar 1.2

Pangsa pengeluaran makanan dan pengetahuan Non Makanan (%)
Kota Malang Tahun 2020-2025

Kelompok Pengeluaran Perkapita	Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kota Malang	
	Rata-Rata (Rupiah)	Persentase (%)
	2025	2025
Makanan	763.834,00	40,41
Bukan Makanan	1.126.221,00	59,59
TOTAL	1.890.055,00	100,00

Sumber: BPS Kota Malang 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Tahun 2025 melaporkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Malang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada kelompok makanan, tetapi juga mencakup kelompok bukan makanan seperti perumahan, listrik, air, transportasi, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan jasa lainnya. pengeluaran masyarakat Kota Malang pada tahun 2025 didominasi oleh pengeluaran non makanan yang mencapai 59,59% atau rata-rata sebesar Rp 1.126.221,00 per kapita per bulan, sedangkan pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar 40,41% dengan rata-rata sebesar Rp 763.834,00 per kapita per bulan dari total pengeluaran rata-rata sebesar Rp 1.890.055,00 per kapita per bulan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pengeluaran masyarakat Kota Malang masih didominasi oleh kebutuhan non makanan, meskipun pengeluaran untuk kebutuhan pangan masih memiliki proporsi yang cukup besar. Dominasi pengeluaran non makanan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat telah berkembang, di mana kebutuhan dasar pangan tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas utama dalam pengeluaran rumah tangga, melainkan telah

diikuti oleh peningkatan kebutuhan lain yang bersifat penunjang kualitas hidup.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas kebijakan bantuan pangan adalah aspek pengawasan dan akuntabilitas. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022 menunjukkan adanya potensi penyelewengan dalam program bantuan sosial, termasuk bantuan pangan. Meskipun DISPANGTAN Kota Malang telah menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti e-monitoring, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih menjadi kendala. Kurangnya koordinasi antarinstansi, seperti antara DISPANGTAN, Dinas Sosial, dan pemerintah kelurahan, juga sering menyebabkan ketidaksinkronan dalam penyaluran bantuan.

Selain aspek ekonomi, dampak psikologis dan sosial akibat kemiskinan juga perlu diperhatikan. Kemiskinan kronis dan ketidakpastian akses pangan dapat memicu stres, isolasi sosial, serta menurunkan kualitas hidup keluarga miskin. Studi empiris menunjukkan bahwa bantuan pangan yang efektif seharusnya tidak hanya mengurangi kerawanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan produktivitas masyarakat.

Meskipun data menunjukkan adanya penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kota Malang, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh keluarga miskin. Kebijakan bantuan pangan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, antara lain terkait ketepatan sasaran penerima, kecukupan bantuan yang diberikan, serta kelancaran proses distribusi. Di samping itu, perbedaan kondisi sosial

ekonomi antar wilayah menyebabkan tingkat efektivitas kebijakan bantuan pangan tidak dapat diperlakukan secara seragam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menilai efektivitas kebijakan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Berdasarkan berbagai permasalahan empiris tersebut, diperlukan kajian yang menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh DISPANGTAN Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Terhadap Keluarga Miskin Di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing pada tahun 2025/2026. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terhadap keluarga miskin di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pangan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang Terhadap Keluarga Miskin Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pangan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin kebijakan publik dan ketahanan pangan. Melalui analisis mendalam terhadap efektivitas kebijakan bantuan pangan di kelurahan purwantoro, penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis tentang bagaimana kebijakan sosial diterapkan dalam skala lokal, termasuk tantangan implementasi dan dampaknya terhadap pengurangan krisis pangan. Dalam bidang ketahanan pangan, penelitian ini berkontribusi dengan memberikan wawasan empiris tentang integrasi antara program bantuan pangan dan strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan model baru dalam literatur akademik. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai referensi bagi studi lanjutan yang mengeksplorasi efektivitas kebijakan bantuan pangan di berbagai konteks geografis atau sosial, sehingga mendorong dialog ilmiah yang lebih luas dan inovasi dalam metodologi penelitian kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hasil penelitian ini memberikan masukan berharga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan pangan. Melalui analisis mendalam terhadap tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, kualitas distribusi, dan dampak terhadap kesejahteraan penerima, penelitian ini mendorong perbaikan praktis, seperti penguatan sistem verifikasi data penerima bantuan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta integrasi teknologi digital untuk pengawasan yang lebih transparan.

Penelitian ini membantu pihak terkait, termasuk Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dengan mengadopsi pendekatan berbasis data untuk memprioritaskan keluarga miskin yang paling rentan. RT/RW sebagai unit terkecil dalam masyarakat berperan penting dalam memfasilitasi distribusi bantuan yang memperkuat solidaritas warga, sekaligus menjadi penghubung administrasi yang mempermudah akses layanan publik, sehingga meningkatkan efisiensi komunitas dalam penanganan masalah lokal.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin Di Kecamatan Blimbing Kota Malang

- a. Pencapaian tujuan

Pelaksanaan kebijakan bantuan pangan di Kecamatan Blimbing telah mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Bantuan yang diberikan telah diterima oleh sebagian besar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat serta memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Namun, masih terdapat kendala berupa data penerima yang belum sepenuhnya akurat sehingga terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Oleh karena itu, indikator pencapaian tujuan dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pendataan dan penetapan sasaran penerima bantuan.

- b. Adaptasi

Pelaksanaan kebijakan bantuan pangan di Kecamatan Blimbing

menunjukkan adanya kemampuan adaptasi yang cukup baik dari instansi pelaksana dalam menghadapi berbagai kendala selama program berlangsung. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan, menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran bantuan. Meskipun masih terdapat kendala terkait akurasi data dan beberapa keluhan masyarakat, pelaksana program telah berupaya melakukan penyesuaian dan perbaikan agar program tetap berjalan sesuai tujuan. Oleh karena itu, indikator adaptasi dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program di lapangan.

c. Integrasi

Pelaksanaan kebijakan bantuan pangan di Kecamatan Blimbing menunjukkan adanya integrasi yang cukup baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, pihak kecamatan, kelurahan, serta pihak penyalur bantuan. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antarinstansi mendukung kelancaran proses penyaluran bantuan, mulai dari pendataan penerima manfaat, penentuan jadwal distribusi, hingga penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan untuk memastikan informasi terkait bantuan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan informasi dan permasalahan data penerima, kerja sama antar pihak yang terlibat secara umum telah berjalan

dengan baik. Oleh karena itu, indikator integrasi dapat dinilai cukup efektif karena didukung oleh koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan program bantuan pangan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bantuan pangan dinas ketahanan pangan dan pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang menentukan efektivitas kolaborasi antar aktor.

- a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam efektivitas kebijakan pangan meliputi:

- 1) Partisipasi relawan yang aktif, yang membantu mengatur proses distribusi bantuan sehingga penyaluran dapat berjalan lebih tertib dan lancar.
- 2) Kesiapan sumber daya manusia (SDM), yang terlihat dari kemampuan petugas dalam melaksanakan pendataan, verifikasi, koordinasi, serta pengawasan selama program berlangsung.
- 3) Kerja sama dan koordinasi antarinstansi yang baik, antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, kelurahan, Puskesmas, serta RT/RW dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.
- 4) Pembagian tugas yang jelas antar pelaksana, sehingga setiap pihak

dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

- 5) Jaringan komunikasi yang baik hingga tingkat RT/RW, yang memudahkan penyampaian informasi terkait jadwal, lokasi, dan mekanisme pengambilan bantuan kepada masyarakat.
- 6) Dukungan dan kepedulian masyarakat, yang tercermin melalui semangat gotong royong dalam membantu pelaksanaan program bantuan pangan

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pangan antara lain:

- 1) Ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data penerima bantuan, seperti penerima yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
- 2) Tingginya mobilitas penduduk, sehingga banyak penerima bantuan sulit ditemukan karena alamat administrasi tidak sesuai dengan tempat tinggal saat ini.
- 3) Perbedaan persepsi masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan, yang menimbulkan keluhan karena adanya penerima yang dianggap kurang layak menerima bantuan.
- 4) Pemanfaatan bantuan yang belum sesuai tujuan program, seperti bantuan pangan yang dijual kembali atau tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

- 5) Keterbatasan sarana dan prasarana distribusi, termasuk lokasi penyaluran yang sempit dan kurang memadai untuk menampung banyak penerima bantuan.
- 6) Kendala teknis dalam proses verifikasi dan dokumentasi, yang menyebabkan proses penyaluran membutuhkan waktu lebih lama dan menimbulkan antrean.
- 7) Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memperbarui data penerima bantuan, karena data penerima ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga perbaikan data memerlukan proses yang lebih panjang.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan pangan di Kecamatan Blimbing telah didukung oleh berbagai aspek, seperti partisipasi relawan, kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta jaringan komunikasi yang berjalan dengan baik. Dukungan tersebut membantu kelancaran proses distribusi bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain ketidakakuratan data penerima bantuan, tingginya mobilitas penduduk, perbedaan persepsi masyarakat mengenai penerima bantuan, keterbatasan sarana distribusi, serta kendala teknis dalam proses penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pelaksanaan distribusi agar program bantuan pangan dapat berjalan lebih efektif,

tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penerima bantuan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang serta instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan kualitas pembaruan dan verifikasi data penerima bantuan secara berkala agar data yang digunakan selalu sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian penerima manfaat.
2. Bagi pelaksana program bantuan pangan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perangkat wilayah, disarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam proses pendataan, sosialisasi, serta penyaluran bantuan. Koordinasi yang baik akan membantu mempercepat penyelesaian kendala yang muncul selama pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat penerima manfaat, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan pangan sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan data atau kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan penerima bantuan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai



efektivitas program bantuan pangan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan pangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1979). Public policy making. Holt, Rinehart and Winston.
- Anderson, J. E. (2010). Public policymaking: An introduction. Cengage Learning.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan publik. Pustaka Pelajar.
- M Richard Steers (1985). Organizational Effectiveness: A behavioral View.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Hayat. (2018). Kebijakan publik. Rajawali Pers.
- Islamy, M. I. (2007). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
- Makmur. (2011). Teori manajemen strategik dalam pemerintahan dan pembangunan. Refika Aditama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1988). Metode penelitian naturalistik kualitatif. Tarsito.
- Nugroho, R. (2011). Public policy. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic development (11th ed.). Addison-Wesley.

Jurnal dan skripsi :

- Abdurrohman, Afifuddin, & Anadza, H. (2020). Sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar). Universitas Islam Malang.
- Arifin, Supriyanto, & Jatmiko, A. R. (2024). Efektivitas kebijakan ketahanan pangan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang [Skripsi].
- Budiani. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar

- Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1), 49-57.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. McGraw-Hill.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. YA3.
- Forensa, D., Alfatah, D., Faridah, & Rahayu, N. (2024). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam penanggulangan kemiskinan.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.
- Imandasari, R., Afifuddin, & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang [Skripsi]. Universitas Islam Malang.
- Permadi, H., & Pramudya, O. (2023). Pengaturan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang (Studi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah).
- Rifa'i, A. (2021). Sumber data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(2), 112-125.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.

Website:

- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase penduduk miskin Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2023). Data kemiskinan Kota Malang 2023. <https://malangkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). Jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Malang 2020-2024. <https://malangkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2025). Pangsa pengeluaran makanan dan non makanan Kota Malang 2020-2024. <https://malangkota.bps.go.id>
- FAO. (2009). *Declaration of the World Summit on Food Security*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan. <https://www.kemsos.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan pengawasan program bantuan sosial. <https://www.kpk.go.id>
- Pemerintah Kota Malang. (2023). Bantuan pangan untuk keluarga miskin Kota Malang tahun 2023. <https://malangkota.go.id>

Undang-undang :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

